



## SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI BERBASIS DIGITAL DI KABUPATEN ACEH BARAT

Annisa Mellani<sup>1</sup>, Nina Eka Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Perbankan Syariah / STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email kontributor: [ninaekaputri@staindirundeng.ac.id](mailto:ninaekaputri@staindirundeng.ac.id)

### Abstrak

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup mekanisme dan instrumen yang digunakan untuk pembayaran guna pemindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya serta lembaga yang berperan dalam sistem pembayaran itu sendiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field study research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul digambarkan dan dijabarkan secara jelas sesuai dengan fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi bagi masyarakat setempat. Masyarakat tidak perlu lagi repot membawa uang tunai dalam jumlah besar, memudahkan penyedia layanan sistem pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi. Dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman, baik untuk pembelian barang maupun pembayaran jasa layanan. Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sistem pembayaran nontunai terkait dengan jaringan internet, infrastruktur internet yang belum merata dan seringkali tidak stabil dapat menyulitkan proses transaksi nontunai. Selain itu, di beberapa toko adanya pemotongan biaya administrasi karena penggunaan nomor rekening di bank yang berbeda atau bank konvensional. Sehingga, pemotongan biaya administrasi dapat menjadi beban tersendiri terutama bagi masyarakat dengan ekonomi terbatas.

**Kata kunci:** *Sistem Pembayaran, Nontunai, Berbasis digital*

*The payment system is a system that includes mechanisms and instruments used for payments to transfer money from one party to another and institutions that play a role in the payment system itself. This study is a type of field study research with a qualitative approach that is descriptive. Data source data is divided into two, namely primary data sources and secondary data sources. Then the data collection technique used observation, interview, and documentation techniques. Furthermore, the collected data is described and explained clearly according to the facts in the field. Based on the results of the study, it was found that the implementation of a digital-based non-cash payment system in West Aceh Regency has had a positive impact on increasing the efficiency and ease of transactions for*

---

*the local community. People no longer need to bother carrying large amounts of cash, making it easier for non-cash payment system service providers to make transactions. By using a digital payment application, transactions can be carried out quickly and safely, both for purchasing goods and paying for services. There are several challenges in implementing a non-cash payment system related to the internet network, the internet infrastructure that is not evenly distributed and often unstable can complicate the non-cash transaction process. In addition, in some stores there are deductions from administration fees due to the use of account numbers at different banks or conventional banks. Thus, cutting administrative costs can be a burden, especially for people with limited finances.*

**Keywords:** *Payment System, Non-Cash, Digital Based*

## **A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang semakin pesat berkembanglah sistem pembayaran berupa uang elektronik (*E-Money*) yang dalam penggunaannya melalui media internet dan juga *smartphone*. Uang elektronik (*electronic money/e-money*) dan uang virtual (*virtual money*) merupakan salah satu instrumen pembayaran yang lahir berkat perkembangan teknologi, jenis uang ini merupakan jawaban atas kebutuhan alat pembayaran mikro yang mampu memproses transaksi dengan cepat dan biaya rendah karena nilai uang yang disimpan, alat ini dapat disimpan pada media tertentu yang dapat diambil dengan aman, murah dan cepat. Selain itu, lahirnya uang elektronik ini juga dipelopori oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014 yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang tunai (*less cash society*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Susanto dan Wibisono, 2018:29-33).

Menurut data Bank Indonesia tahun 2019, uang elektronik memimpin pembayaran nontunai dengan transaksi 95,75 triliun, naik dari 60,00 triliun pada tahun Sebelumnya, (2018). Uang elektronik banyak digunakan untuk pembayaran nontunai sebagai akibat dari perkembangan produk uang elektronik, yang meliputi kartu *e-money* berbasis *chip* dan *server*, serta aplikasi *e-wallet* dan rekening bank. Pembayaran nontunai menggunakan uang elektronik menjadi suatu peluang yang saat ini digunakan oleh para penggunanya untuk meminimalkan penggunaan transaksi secara tunai (Susanto dan Wibisono, 2018:34-36)

Uang elektronik memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman daripada uang tunai, terutama untuk transaksi bernilai kecil, karena memungkinkan transaksi menjadi lebih praktis, cepat dan hemat biaya sekaligus memastikan keamanan konsumen dan pedagang serta kecepatan transaksi. Saat ini, terdapat beberapa penerbit uang elektronik (*electronic money*) yang beroperasi di Indonesia sebagai alat pembayaran nontunai yang dapat dimanfaatkan di berbagai sektor usaha, antara lain Gopay, OVO, Dana, dan LinkAja.

Sistem pembayaran nontunai berbasis digital telah menjadi fokus utama dalam upaya modernisasi dan kemajuan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, sistem pembayaran nontunai telah menjadi pilihan yang lebih efisien dan aman bagi masyarakat. Pembayaran nontunai memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik, tanpa perlu menggunakan uang tunai secara langsung.

Adopsi pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi transaksi, meningkatkan keamanan, serta memperluas aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat. Selain itu, dengan menggunakan sistem pembayaran nontunai, Kabupaten Aceh Barat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada uang tunai.

Namun, dalam mengimplementasikan sistem pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa diantaranya adalah tingkat literasi digital yang masih rendah di kalangan masyarakat, kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kekhawatiran akan keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan cara penggunaan sistem pembayaran nontunai, serta investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Dengan demikian, pengembangan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat merupakan langkah penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan sistem pembayaran nontunai dapat menjadi bagian integral dalam transformasi ekonomi dan keuangan Kabupaten Aceh Barat menuju masa depan yang lebih modern dan efisien.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi dan tingkah-tingkah manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri (Usman dan Akbar, tt: 81). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mempelajari secara *intensif* tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di toko-toko yang menerapkan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang implementasi sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari pendapat atau persepsi mereka tentang segala hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran nontunai. Kemudian, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan berupa buku, jurnal atau sumber pustaka yang berkaitan dengan sistem pembayaran nontunai.

Berikutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terakhir, teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah reduksi data, penyajian data, dan analisis data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai Berbasis Digital di Kabupaten Aceh Barat

Penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital semakin berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Melalui penelitian yang telah dilakukan, penulis berhasil mengidentifikasi Sepuluh toko pilihan yang menerapkan sistem pembayaran nontunai dengan beragam metode, mulai dari QRIS, mobile banking, kartu debit, dan lain sebagainya.

Dalam era digital seperti saat ini, penerapan sistem pembayaran nontunai menjadi suatu keharusan dan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu daerah yang terletak di Provinsi Aceh telah mulai mengadopsi dan menerapkan sistem pembayaran nontunai dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama di sektor perdagangan. Salah satu metode pembayaran nontunai yang telah banyak diterapkan di Sepuluh toko ini adalah QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Melalui QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran dengan mudah hanya dengan melakukan pemindaian kode QR yang tertera di toko atau tempat usaha. Dengan adopsi teknologi QRIS, transaksi menjadi lebih efisien dan cepat tanpa perlu menggunakan uang tunai (Wulandari, 2019:23).

Sistem pembayaran nontunai QRIS telah menjadi pilihan yang populer bagi gerai makanan, seperti King Fried Chicken, Ayam Geprek Junpiyo dan gerai makanan lainnya memberikan dampak positif yang signifikan. Karyawan King Fried Chicken menyatakan bahwa sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, pedagang, dan pengguna (Wawancara dengan Ibu Nurul pada tanggal 8 Mei 2024). Masyarakat kini dapat dengan mudah melakukan pembayaran melalui sistem QRIS. Cukup dengan melakukan pemindaian kode QR dan beberapa klik, transaksi pembayaran dapat segera dilakukan. Hal ini tentu mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran di gerai makanan, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan meningkatkan efisiensi waktu. Dari sudut pandang pedagang, menggunakan sistem pembayaran nontunai, QRIS juga memberikan keuntungan. Salah satu keuntungan utama adalah kemudahan dalam mengelola transaksi pembayaran. Dengan hanya perlu memajang satu kode QRIS, pedagang tidak perlu lagi menyediakan banyak QR Code untuk setiap jenis aplikasi pembayaran QR. Hal ini meminimalisir kerumitan dan kebingungan bagi para pedagang dalam mengelola sistem pembayaran (Wawancara dengan ibu Intan pada tanggal 12 Mei 2024).

Pengguna juga merasakan manfaat dari penggunaan QRIS dalam melakukan pembayaran di gerai makanan. Mereka dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun yang mereka miliki, tanpa terbatas pada satu jenis aplikasi pembayaran saja. Fleksibilitas ini memberikan kenyamanan bagi pengguna dan juga memungkinkan mereka untuk memilih metode pembayaran yang sesuai dengan preferensi masing-masing. Selain kemudahan, keamanan transaksi juga menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam sistem pembayaran nontunai QRIS. Dengan menggunakan teknologi QRIS, transaksi pembayaran menjadi lebih aman karena tidak melibatkan uang tunai yang rentan terhadap pencurian. Selain itu, data pembayaran juga terenkripsi dengan baik, menjaga keamanan informasi pengguna.

Tidak hanya itu, dengan adanya sistem pembayaran nontunai QRIS, gerai makanan juga dapat melakukan program kemitraan dengan pihak lain, seperti bank atau perusahaan *e-wallet*. Hal ini memungkinkan gerai makanan untuk memberikan promo eksklusif kepada pemegang kartu atau pengguna *e-wallet* tertentu, Sehingga, dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial.

Dengan mengintegrasikan program promosi dan loyalitas ke dalam sistem pembayaran nontunai QRIS, gerai makanan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran nontunai juga akan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan efisien (Wawancara dengan ibu yeni pada tanggal 5 Mei 2024).

Selanjutnya, pada toko kelontong Riko yang beralamat di Desa Ujung Kalak, bapak Riko mengungkapkan bahwa, sejak menerapkan sistem pembayaran nontunai, toko kelontongnya menjadi lebih ramai dikunjungi oleh pelanggan. Hal ini tentu menjadi kabar baik, karena menandakan adopsi masyarakat terhadap kemajuan teknologi dalam hal sistem pembayaran (Wawancara dengan bapak Riko pada tanggal sepuluh Mei 2024). Dengan adanya berbagai pilihan metode pembayaran nontunai di toko tersebut seperti transfer uang BSI melalui mobile banking, top up dana, OVO, maupun isi token listrik, pelanggan memiliki lebih banyak opsi untuk melakukan pembayaran, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik toko kelontong tersebut. Hal ini juga memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai secara fisik.

Tidak hanya toko kelontong Bapak Riko yang telah merasakan manfaat dari sistem pembayaran nontunai, tetapi juga toko-toko lainnya seperti toko syifa kosmetik Syifa Jaya, toko bakopi dan mini market nana juga menyatakan bahwa inovasi ini telah membantu menggerakkan roda perekonomian secara keseluruhan. Dengan adanya sistem pembayaran nontunai, para pelanggan dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah penjualan dan pendapatan bagi para pemilik usaha (Wawancara dengan Ibu Nana pada tanggal 12 Mei 2024).

Salah satu manfaat utama dari sistem pembayaran nontunai adalah kemudahan dalam bertransaksi. Para pelanggan tidak perlu lagi membawa uang tunai secara fisik, yang seringkali rentan terhadap pencurian atau kehilangan. Sebaliknya, mereka dapat melakukan pembayaran melalui kartu debit, kartu kredit, atau metode pembayaran digital lainnya, yang lebih aman dan nyaman. Hal ini juga membantu para pemilik usaha mengurangi risiko terhadap tindak kriminal yang mungkin terjadi di tempat usaha mereka (wawancara dengan ibu yeni pada tanggal 5 Mei 2024).

Selain itu, adopsi sistem pembayaran nontunai juga membuka peluang bagi para pemilik usaha untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan adanya kemampuan untuk menerima pembayaran nontunai, toko-toko dapat menarik pelanggan yang lebih luas, termasuk mereka yang lebih cenderung untuk melakukan transaksi secara digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan omset penjualan, tetapi juga membantu memperluas jangkauan pasar bagi para pemilik usaha (Wawancara dengan Ibu Nana pada tanggal 10 Mei 2024).

Tidak hanya itu, penggunaan *mobile banking* juga semakin populer di Kabupaten Aceh Barat. Dengan menggunakan layanan mobile banking dari berbagai bank yang tersedia, konsumen dapat dengan mudah melakukan pembayaran tanpa perlu repot membawa uang tunai. Kemudahan akses dan keamanan transaksi menjadi alasan utama mengapa masyarakat semakin banyak yang beralih ke sistem pembayaran nontunai berbasis mobile banking (Wawancara dengan ibu Azizah pada tanggal 12 Mei 2024). Selain QRIS dan *mobile banking*, penggunaan kartu debit juga menjadi pilihan yang diminati oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Melalui kartu debit,

transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Penggunaan kartu debit juga memberikan kemudahan dalam melacak riwayat transaksi, Sehingga, membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih teratur dan transparan (Wulandari, 2019:23).

Dalam penelitian yang penulis lakukan, Sepuluh toko pilihan yang telah menerapkan sistem pembayaran nontunai dengan berbagai metode tersebut telah memberikan dampak positif baik bagi para penjual maupun konsumen. Penjual dapat meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi dan mengurangi risiko pencurian uang tunai, sementara konsumen dapat menikmati kemudahan dan keamanan dalam melakukan pembayaran.

Tidak hanya itu, penerapan sistem pembayaran nontunai juga memberikan dampak positif dalam hal inklusi keuangan. Masyarakat yang Sebelumnya, sulit mengakses layanan keuangan kini dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Hal ini tentu saja membantu dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat, diharapkan dapat mempercepat perkembangan ekonomi daerah dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih modern dan efisien. Selain itu, penerapan ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan maju dalam era digital.

## **2. Kendala-kendala dalam menggunakan Sistem Pembayaran Nontunai Berbasis Digital di Kabupaten Aceh Barat**

Kendala merupakan halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam Penggunaan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat menghadapi beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama dalam menggunakan sistem pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat adalah terkait dengan jaringan internet. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Mr DIY, terdapat beberapa kendala dalam penggunaan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di toko tersebut.

Salah satu kendala utama yang disebutkan adalah jaringan internet yang kurang stabil. Hal ini menjadi masalah serius karena transaksi nontunai membutuhkan koneksi internet yang handal untuk menjamin kelancaran proses pembayaran. Ketidakstabilan jaringan internet dapat menyebabkan proses transaksi menjadi lambat atau bahkan terhenti secara tiba-tiba. Hal ini tentu saja dapat mengganggu pengalaman berbelanja pelanggan dan menurunkan efisiensi operasional toko (Wawancara dengan Ibu Annisa, Pada tanggal 24 April 2024). Selain itu, kendala ini juga dapat berdampak langsung pada pendapatan toko jika pelanggan memilih untuk tidak melanjutkan transaksi akibat masalah koneksi internet. Selain jaringan internet yang kurang stabil, kendala lain yang disebutkan adalah adanya pemotongan biaya administrasi. Meskipun transaksi nontunai dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan, namun adanya biaya tambahan untuk administrasi bisa menjadi beban bagi toko maupun pelanggan. Biaya administrasi yang dikenakan oleh penyedia jasa pembayaran nontunai dapat membuat harga produk di toko menjadi lebih tinggi, atau bahkan membuat pelanggan enggan untuk menggunakan metode pembayaran nontunai.

Kendala-kendala tersebut tentu menjadi perhatian serius bagi manajemen Mr DIY. Untuk mengatasi masalah jaringan internet yang kurang stabil, perlu dilakukan evaluasi terhadap

penyedia layanan internet yang digunakan. Manajemen toko juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi yang dapat menyimpan data transaksi secara offline sementara jika terjadi gangguan koneksi internet, Sehingga, proses transaksi dapat tetap berjalan lancar meskipun dalam kondisi jaringan yang kurang stabil. Sementara itu, terkait dengan pemotongan biaya administrasi, Mr DIY dapat melakukan negosiasi dengan penyedia jasa pembayaran nontunai untuk mencari solusi yang lebih menguntungkan bagi toko maupun pelanggan.

Selain itu, toko juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau diskon bagi pelanggan yang menggunakan metode pembayaran nontunai, Sehingga, dapat mendorong penggunaan metode pembayaran tersebut tanpa terlalu memberatkan pelanggan. Kendala lainnya yaitu terkait terkait delay QRIS di toko Miniso. Salah satu toko yang dikenal dengan produk-produknya yang unik dan harga terjangkau adalah Miniso. Namun, meskipun Miniso menawarkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, terdapat kendala yang cukup sering dijumpai oleh parapelanggan, yaitu terkait keterlambatan dalam proses transaksi. Meskipun sistem pembayaran nontunai seharusnya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, namun kenyataannya masih terdapat kasus di mana proses transaksi menggunakan QRIS mengalami delay yang cukup mengganggu<sup>54</sup>. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan dan mempengaruhi efisiensi waktu dalam berbelanja.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak manajemen Miniso untuk menangani kendala ini dengan serius. Perbaikan dalam sistem pembayaran nontunai, termasuk mengurangi delay QRIS merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pihak terkait baik dari segi *merchant* maupun pihak bank, perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pembayaran nontunai QRIS yang digunakan di Miniso. Perbaikan teknis pada sistem pembayaran perlu dilakukan guna meningkatkan kecepatan dan keandalan proses transaksi. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk mengurangi atau menghapuskan potongan biaya transfer administrasi yang dikenakan kepada para pelanggan.

Selain dari pihak *merchant* dan bank, peran dari pemerintah juga sangat diharapkan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Regulasi yang mendukung penggunaan sistem pembayaran nontunai perlu diperkuat dan diperjelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong terciptanya standar-standar yang jelas terkait dengan tarif potongan biaya administrasi agar tidak memberatkan konsumen.

### **3. Analisis Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan selama satu bulan lamanya, maka dapat dibahas lebih lanjut mengenai penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun.

Sebelumnya, penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat telah menjadi sebuah inovasi yang memberikan dampak positif dalam meningkatkan

efisiensi dan kemudahan transaksi bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan selama satu bulan, terlihat bahwa adopsi teknologi pembayaran nontunai di daerah tersebut telah memberikan beragam manfaat yang signifikan.

Salah satu manfaat utama dari sistem pembayaran nontunai adalah efisiensi dalam bertransaksi. Masyarakat tidak perlu lagi repot membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang rentan membuat mereka menjadi target kejahatan. Dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman, baik untuk pembelian barang maupun pembayaran jasa layanan. Hal ini juga meminimalisasi risiko kehilangan uang dan memudahkan pengawasan transaksi keuangan bagi pengguna.

Selain efisiensi, kemudahan dalam bertransaksi juga menjadi keunggulan sistem pembayaran nontunai. Dengan aplikasi pembayaran digital, masyarakat dapat melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun tanpa harus repot mencari mesin ATM atau membawa uang tunai fisik. Keberadaan jaringan internet yang semakin luas dan akses yang mudah membuat pembayaran nontunai semakin diminati oleh masyarakat, terutama generasi milenial yang gemar menggunakan teknologi (Rifai, 2018: 25). Selain manfaat bagi masyarakat, penerapan sistem pembayaran nontunai juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara nontunai, maka akan meningkatkan pangsa pasar bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan juga menjadi lebih mudah dilakukan. Sehingga, mempermudah pengawasan dan pengendalian atas aliran keuangan di daerah tersebut (Wawancara dengan ibu Yeni pada tanggal 5 Mei 2024).

Pembahasan pada penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian terdahulu yang berjudul Kesiapan Digitalisasi Sistem pembayaran nontunai di Pasar Rakyat, yaitu peningkatan omset penjualan pada pasar rakyat, dengan adanya kemudahan pembayaran nontunai, para pedagang dapat menjangkau lebih banyak konsumen yang mungkin tidak membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup. Hal ini membuka peluang bisnis yang lebih luas dan meningkatkan potensi pendapatan bagi para pedagang.

Tak hanya itu, digitalisasi pembayaran nontunai juga membantu dalam meminimalkan risiko kehilangan uang dan pencatatan transaksi yang lebih akurat. Dengan transaksi yang tercatat secara digital, seperti kartu kredit, e-wallet, atau transfer bank, konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar yang rentan terhadap pencurian. Selain itu, kehilangan uang juga menjadi risiko yang lebih kecil karena transaksi dilakukan secara elektronik dan tercatat dengan jelas (Febrinda, 2022). Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sistem pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya adalah tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata.

Beberapa kalangan masyarakat, terutama yang lebih tua, mungkin kesulitan untuk mengoperasikan aplikasi pembayaran digital. Sehingga, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Selain itu, infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang masih terbatas di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem pembayaran nontunai. Upaya untuk meningkatkan akses internet dan infrastruktur teknologi menjadi hal yang penting agar sistem pembayaran nontunai dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat (Wulandari, 2021:35). Infrastruktur internet yang cepat dan handal merupakan salah satu komponen kunci dalam mendorong perkembangan sistem pembayaran nontunai berbasis



digital di Kabupaten Aceh Barat. Dalam era digitalisasi, kemampuan untuk melakukan transaksi secara online menjadi semakin penting, dan hal ini tidak terkecuali bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur internet yang cepat menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa proses pembayaran nontunai berjalan dengan lancar dan efisien.

Salah satu manfaat utama dari adopsi sistem pembayaran nontunai berbasis digital adalah efisiensi. Dengan infrastruktur internet yang cepat, proses pembayaran dapat dilakukan secara real-time, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan akurat. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari, mulai dari pembayaran tagihan hingga pembelian barang dan jasa secara online. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran nontunai juga dapat mengurangi risiko kehilangan uang fisik dan meminimalkan biaya administrasi terkait dengan pengelolaan uang tunai. Namun, upaya untuk meningkatkan infrastruktur internet yang cepat di Kabupaten Aceh Barat tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari ketersediaan sinyal internet yang stabil hingga keterbatasan akses ke teknologi informasi di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan stakeholders terkait untuk bersama-sama merancang strategi yang tepat guna mempercepat peningkatan infrastruktur internet di daerah ini.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperluas jangkauan jaringan internet, baik melalui pengembangan infrastruktur fisik maupun pemanfaatan teknologi satelit. Dengan memperluas cakupan jaringan internet, diharapkan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, Sehingga, proses pembayaran nontunai berbasis digital dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan ini juga akan membuka peluang bagi pengembangan ekosistem digital di daerah tersebut, menciptakan potensi ekonomi yang baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, peningkatan infrastruktur internet yang cepat juga perlu didukung dengan program pelatihan dan sosialisasi penggunaan sistem pembayaran nontunai berbasis digital. Edukasi mengenai manfaat dan cara menggunakan sistem pembayaran nontunai perlu diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Workshop dapat menjadi salah satu cara efektif untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai penggunaan sistem pembayaran nontunai. Dalam workshop ini, peserta dapat diajarkan secara langsung mengenai cara menggunakan berbagai jenis sistem pembayaran nontunai, seperti kartu kredit, *e-money*, dan internet banking. Selain itu, peserta juga dapat diberikan pemahaman mengenai keamanan dalam bertransaksi secara nontunai dan manfaat dari penggunaan sistem pembayaran nontunai dalam mendukung ekonomi digital. Selain workshop, penyelenggaraan seminar juga dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi mengenai sistem pembayaran nontunai kepada masyarakat. Dalam seminar ini, para ahli dan praktisi di bidang teknologi keuangan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perkembangan dan peluang dalam penggunaan sistem pembayaran nontunai. Dengan adanya seminar ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran.

Tidak hanya itu, kampanye-kampanye publik juga dapat menjadi cara yang efektif untuk menyosialisasikan penggunaan sistem pembayaran nontunai kepada masyarakat luas. Melalui kampanye-kampanye ini, informasi mengenai manfaat dan cara penggunaan sistem pembayaran nontunai dapat disampaikan secara menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi secara nontunai dalam era digital ini.

Dengan berbagai manfaat dan tantangan yang ada, penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat merupakan langkah positif dalam memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kemudahan serta efisiensi dalam bertransaksi bagi masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem pembayaran nontunai di kabupaten Aceh Barat, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta mengimplementasikan regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem pembayaran digital.

Aspek regulasi dalam upaya penerapan sistem pembayaran nontunai. Berikut adalah beberapa aspek regulasi yang penting dalam upaya penerapan sistem pembayaran nontunai sebagai berikut.

1. **Perlindungan Konsumen:** Regulasi harus memastikan bahwa konsumen dilindungi dari penipuan, kesalahan transaksi, dan penyalahgunaan data pribadi. Ini termasuk kebijakan mengenai pengembalian dana, penyelesaian sengketa, dan transparansi biaya.
2. **Keamanan Data:** Standar keamanan yang ketat harus diterapkan untuk melindungi data pengguna dari ancaman siber. Ini mencakup enkripsi data, autentikasi ganda, dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti *PCI-DSS*. *PCI-DSS* adalah standar keamanan global untuk semua entitas yang menyimpan, memproses, atau mengirimkan data pemegang kartu dan/atau data autentikasi sensitif. *PCI-DSS* menetapkan tingkat perlindungan dasar bagi konsumen dan membantu mengurangi penipuan dan pelanggaran data di seluruh ekosistem pembayaran.
3. **Kepatuhan terhadap Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:** Penyedia layanan pembayaran nontunai harus mematuhi regulasi untuk mencegah penggunaan sistem pembayaran untuk kegiatan ilegal. Ini mencakup kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan verifikasi identitas pengguna.
4. **Interoperabilitas Sistem:** Regulasi harus mendorong interoperabilitas antara berbagai sistem pembayaran nontunai agar pengguna dapat dengan mudah bertransaksi meskipun menggunakan platform yang berbeda. Ini juga mencakup standar teknis dan operasional yang konsisten (Wulandari, 2021: 39).
5. **Transparansi dan Pengungkapan:** Penyedia layanan harus diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai biaya, waktu pemrosesan, dan kebijakan privasi kepada konsumen.
6. **Lisensi dan Pengawasan:** Pemerintah harus menetapkan persyaratan lisensi bagi penyedia layanan pembayaran nontunai dan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ini termasuk audit berkala dan pelaporan rutin.
7. **Inklusi Keuangan:** Regulasi harus mendukung upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani.

8. Inovasi dan Kompetisi: Regulasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat inovasi dan persaingan yang sehat. Ini bisa termasuk kebijakan *sandbox* regulasi yang memungkinkan penyedia layanan baru untuk menguji produk mereka dalam lingkungan yang terkontrol.
9. Tata Kelola dan Kepatuhan: Penyedia layanan harus memiliki struktur tata kelola yang baik dan mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk pelatihan bagi staf dan penetapan kebijakan internal yang sesuai.
10. Kolaborasi Internasional: Mengingat banyaknya transaksi lintas negara, kolaborasi internasional dan harmonisasi regulasi sangat penting untuk memastikan sistem pembayaran nontunai dapat berfungsi dengan baik di tingkat global.

Dengan mengatur aspek-aspek ini, pemerintah dan otoritas terkait dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan sistem pembayaran nontunai yang aman, efisien, dan inklusif. Harmonisasi regulasi antar negara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sistem pembayaran nontunai di tingkat global. Berikut adalah beberapa alasan dan cara harmonisasi regulasi dapat mendukung tujuan ini sebagai berikut.

1. Transaksi Lintas Batas yang Efisien
  - a) Mengurangi Hambatan: Harmonisasi regulasi dapat mengurangi hambatan dalam transaksi lintas negara, memudahkan konsumen dan bisnis dalam melakukan pembayaran internasional.
  - b) Meningkatkan Kecepatan dan Efisiensi: Standar yang seragam memungkinkan transaksi diproses lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu dan biaya.
2. Keamanan dan Kepercayaan
  - a) Standar Keamanan yang Konsisten: Regulasi yang harmonis memastikan bahwa standar keamanan tinggi diterapkan secara global, melindungi pengguna dari penipuan dan ancaman siber.
  - b) Meningkatkan Kepercayaan Pengguna: Konsumen dan bisnis lebih cenderung menggunakan sistem pembayaran nontunai yang mereka percayai memiliki proteksi yang baik di mana pun mereka berada.
3. Inklusi Keuangan Global

Akses Lebih Luas: Harmonisasi regulasi dapat membantu memperluas akses ke layanan pembayaran nontunai di negara-negara berkembang, mendukung inklusi keuangan global.
4. Kompetisi yang Sehat dan Inovasi
  - a) Mendorong Inovasi: Regulasi yang seragam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, memungkinkan penyedia layanan untuk mengembangkan produk baru yang dapat diadopsi secara luas.
  - b) Persaingan yang Adil: Harmonisasi membantu menciptakan level *playing field* bagi penyedia layanan dari berbagai negara, menghindari ketidakseimbangan regulasi yang dapat merugikan pihak tertentu.

Pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem pembayaran digital, termasuk perlindungan data konsumen, keamanan transaksi, serta

insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan sistem pembayaran nontunai. Dengan regulasi yang jelas dan mendukung, akan memudahkan adopsi sistem pembayaran nontunai di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di kabupaten Aceh Barat.

Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di kabupaten Aceh Barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat maka pelaksanaan sistem pembayaran nontunai dapat sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ekonomi dan keuangan di daerah tersebut. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama diharapkan dapat memimpin inisiatif ini dengan memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam hal regulasi maupun pendanaan. Dengan demikian, penerapan sistem pembayaran nontunai di kabupaten Aceh Barat dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penerapan sistem pembayaran nontunai berbasis digital di Kabupaten Aceh Barat telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi bagi masyarakat setempat. Masyarakat tidak perlu lagi repot membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang rentan membuat mereka menjadi target kejahatan. Dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman, baik untuk pembelian barang maupun pembayaran jasa layanan. Kedua, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sistem pembayaran nontunai di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya adalah terkait dengan jaringan internet. Infrastruktur internet yang belum merata dan seringkali tidak stabil dapat menyulitkan proses transaksi nontunai. Hal ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat dan bisnis yang menggunakan sistem pembayaran nontunai. Selain itu, pemotongan biaya administrasi dapat menjadi beban tersendiri terutama bagi masyarakat dengan ekonomi terbatas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achadi, A dan Winarto, H. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Produk, Persepsi Risiko dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan layanan Go- Pay*. Purwokerto : Wijaya Kusuma.
- Alamsyah, A. 2018. *Pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat menggunakan sistem pembayaran nontunai di Inodonesia* . Semarang : Gramadia.
- Anotimus. 2024. *Perkembangan Mobile Banking di Indonesia*. Simatupang : Arcadia.
- Agustinova, Eko Danu. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Calpulis.
- timeLayanan Perbankan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Siteba. Padang : Cv. PB Amerta.
- Austik, Triyani Febry. 2023. *Efektivitas Penggunaan QRIS Aplikasi Mobile Banking BSI oleh UMKM BINAAN Bank Syariah Indonesia*. Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq.

- Chairunnisa, Silvira. 2023. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Keamanan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Bertransaksi Menggunakan Layanan Pembayaran Digital QRIS*. Skripsi Universitas Medan Area.
- Febrinda, Rizky Ramadini. 2022. *Kesiapan Digitalisasi Sistem Pembayaran Non Tunai Di Pasar Rakyat*. Universitas Asahan.
- Grana, Yudistira K. 1999. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif*. Bandung : Primateo Akademik.
- Herlen, Astri Tania. 2021. *Implementasi Kebijakan Transaksi Non- Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lauden, Kenneth C. dan Carol Guercio. 2018. *Transaksi e-commerce serta metode pembayaran nontunai dalam konteks bisnis online*. Jakarta: Gramedia
- Muhaimin. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Rosda Karya.
- N.Venkatesh. 2019. *Dampak digital dan model bisnis dibalik transaksi pembayaran online*. Jakarta: Gramedia
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo, A dan Utama D. 2017. *Pengaruh faktor eksternal terhadap adopsi sistem pembayaran nontunai di kalangan usaha kecil menengah*. Jakarta. Bumi Aksara
- Rifai, Ahmad. 2018. “ *Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai di Era Digital*”. PT.Pustaka Digital.
- Sugiono. 2016. *Desain Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Susanto, H. 2018. *Analisis Perkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia*. Jurnal Teknologi informasi dan komputer. Bandung. Mega Makmur Sentosa.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. 2018. *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*. Jurnal IAIN Punogoro.
- Usman, Husaini .2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wulandari, Ayu. 2021. “*Pemberdayaan UMKM melalui Pembayaran Digital*”. Journal of small Business Empowerment .